

DINAMIKA POLITIK SANTRI

**(Studi Kasus Pergeseran Pilihan Partai Politik Masyarakat Santri
Pada Pemilu 2004 Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

MASHURI
NIM: 00540240

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

DRS. H. CHUMAIDI SYARIEF ROMAS, M.Si
USTADI HAMZAH, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mashuri
Lamp. : satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

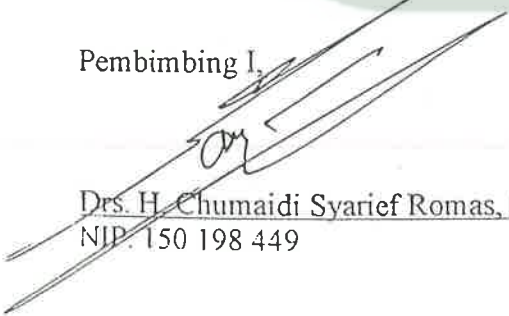
Nama : Mashuri
NIM : 00540240
Jurusan : Sosiologi Agama
Judul Skripsi : Dinamika Politik Santri (Studi Kasus Pergeseran Pilihan Partai Politik Masyarakat Santri Pada Pemilu 2004 Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)

Maka selaku pembimbing/pembantu pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk dimunaqsyahkan.
Demikian, mohon maklum adanya.

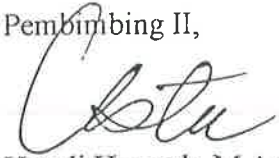
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Januari 2006

Pembimbing I,


Drs. H. Chumaidi Syarief Romas, M.Si
NIP. 150 198 449

Pembimbing II,


Ustadhi Hamzah, M.Ag
NIP. 150 298 987



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/1321/2005

Skripsi dengan judul : Dinamika Politik Santri (Studi Kasus Pergeseran Pilihan Partai Politik Masyarakat Santri Pada Pemilu 2004 Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)

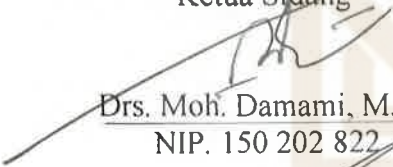
Diajukan oleh :

1. Nama : Mashuri
2. NIM : 00540240
3. Program Sarjana Strata 1 Program Studi: Sosiologi Agama

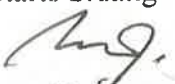
Telah dimunaqosyahkan pada hari: Kamis, tanggal 2 Februari 2006 dengan nilai: 76, 6 (B) dan telah dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang


Drs. Moh. Damami, M.Ag
NIP. 150 202 822

Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
NIP. 150 228 024

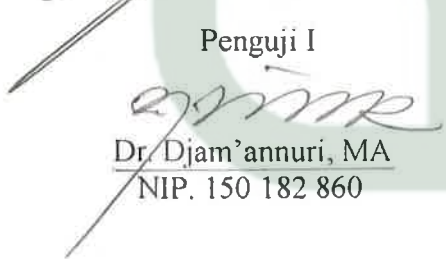
Pembimbing/merangkap Penguji


Drs. H. Chumaidi Syarief R., M.Si
NIP. 150 198 449

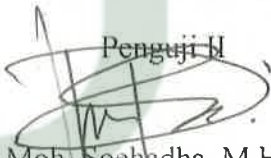
Pembantu Pembimbing


Ustadhi Hamzah, M.Ag
NIP. 150 298 987

Penguji I

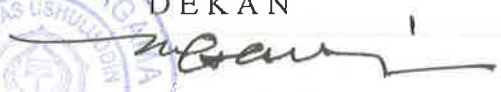

Dr. Djam'annuri, MA
NIP. 150 182 860

Penguji II


Moh. Soehadha, M.Hum
NIP. 150 291 739

Yogyakarta, 2 Februari 2006

DEKAN


Drs. H. M. Fahmie, M.Hum
NIP. 150 088 748



MOTTO

**JANGAN TAKUT TERHADAP KEBESARAN
ADA ORANG YANG LAHIR DENGAN SUATU KEBESARAN
ADA ORANG YANG KEPADANYA DISODORKAN KEBESARAN
ADA ORANG YANG MASIH HARUS MERAH KEBESARAN
JIKA INGIN MENJADI ORANG BESAR
MAKA JANGAN SUKA BEROMONG BESAR**



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

- Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang-Nya kepada penyusun, semoga segala potensi dan karunia yang telah ditebarkan-Nya mampu diaplikasikan dengan baik dan benar oleh penyusun sebagai insan pilihan
- Ayahanda Soleh, semoga semangat dan perjuanganmu dapat diteruskan oleh puteramu ini, ibunda Hotimah yang telah membimbing dengan kesabaran dan kerendahan hati, semoga akhlak dan budiku tak jauh beda dengan kalian berdua sebagai orang tuaku sekaligus menjadi Uswatun Hasanah bagi keluarga
- Seluruh teman-teman seperjuangan yang *males* untuk menyebutnya satu per satu
- Para pecinta “teologi pembebasan”

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, tiada pilih kasih dan Maha Penyayang, tiada pandang sayang. Puji syukur kepada Allah atas segala petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul PRIMORDIALISME POLITIK MASYARAKAT SANTRI PEMILIH DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Chumaidi Syarif Romas, M.Si selaku Dosen Pembimbing satu dan Bapak Ustadhi Hamzah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing dua dalam penulisan skripsi, juga kepada semua pihak teman dan sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya di sini.

Semoga segala apa yang telah disumbangkan dicatat sebagai amal kebaikan yang akan memberi manfaat, *jazakumu allah ahsana al-jaza'*.

Kritik dan saran tentunya akan mendekatkan skripsi ini pada penyempurnaan, harapan penulis dengan segala kekurangan dan kelemahannya, skripsi ini bisa bermanfaat untuk pengkajian dan kegiatan keilmuan selanjutnya. Amin.

ABSTRAK

Pada skripsi ini pembaca diajak untuk mengetahui fenomena politik dalam pemilu 2004 di Kecamatan Playen Gunungkidul Yogyakarta, yaitu fenomena pindah partai oleh warga santri Muhammadiyah dari PAN ke PKS di Desa Playen dan warga santri NU dari PKB ke PKPB, PKS dan PAN di Desa Ngawu, Getas, Banyusoco dan Bleberan. Fenomena tersebut dipandang anomali, sebab awalnya Muhammadiyah-PAN atau NU-PKB merupakan satu atap dan satu ideologi. Pada pemilu 1999 ke bawah, basis kultur primordial selalu mewarnai gerak warga dari kedua organ tersebut, termasuk corak orientasi politik. Namun pada pemilu 2004 terjadilah pergeseran kultur primordial, yaitu pindah partai. Oleh sebab itu, rumusan masalah difokuskan pada upaya menjawab pergeseran tersebut, yaitu motif dan proses pindah partai.

Riset ini dilakukan di 5 desa wilayah Kecamatan Playen, yaitu Desa Ngawu, Getas, Banyusoco, Bleberan dan Playen, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif-analisis. Sedangkan tekniknyanya adalah observasi dan interview. Subyek riset adalah 9 orang sebagai *key informan* yang terdiri dari 4 informan Desa Ngawu, 2 informan Desa Getas, 1 informan Desa Banyusoco dan Bleberan, 2 informan Desa Playen. Pisau analisis menggunakan pendekatan teoritis dari Blau, Homans, Warren dan Norman, Feith dan Castles.

Hasil riset menunjukkan bahwa motif pindah partai meliputi motif ekonomi dan *prestise*. Motif ekonomi terdapat pada Desa Getas dan Ngawu. Motif *prestise* terdapat pada Desa Banyusoco, Bleberan dan Playen. Munculnya motif ekonomi sebab tidak adanya keseimbangan *reward* dan *cost* antara warga santri NU dengan elit PKB di Desa Ngawu dan Getas, baik *reward* yang bersifat ekstrinsik maupun intrinsik [Blau]. Munculnya motif *prestise* sebab tidak adanya kegiatan, interaksi dan perasaan yang bersifat timbal balik antara warga santri NU dengan elit PKB di Desa Banyusoco dan Bleberan, serta antara warga santri Muhammadiyah dengan elit PAN di Desa Playen [Homans].

Proses pindah partai melibatkan *money politics*. *Money politics* digunakan oleh PKPB, PKS dan PAN untuk memobilisasi warga santri NU agar keluar dari PKB dengan memanfaatkan tim sukses PKB, kelompok da'i serta tim kemenangan TPS sebagai *corong* politik di Desa Ngawu, Getas, Banyusoco dan Bleberan. Proses tersebut berjalan mulus didukung oleh kemiskinan warga [Warren dan Norman], tidak adanya konsolidasi, serta akrabnya dengan tradisi *money politics*, sebab Golkar merupakan partainya NU pada pemilu 1997 ke bawah. Sementara itu, strategi politik uang oleh PAN –ditambah kasus korupsi oleh oknum elit PAN- ternyata membawa imbas bagi warga santri Muhammadiyah terpelajar Desa Playen untuk keluar dari PAN dan pindah ke PKS, sebab PKS dinilai lebih bersih. Basis ideologi Islami masih mewarnai pilihan politik mereka, layaknya pemilu 1997 ke bawah, dimana pilihan politik mereka disandarkan pada PPP.

Dengan demikian, basis kultur politik primordial mengalami pergeseran menuju romantisme pemilu 1997-an, namun arahnya berlainan. Pindahnya warga santri NU mengusung romantisme Golkar, sedangkan pindahnya warga santri Muhammadiyah terpelajar mengusung romantisme PPP [Feith dan Castles].

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PLAYEN	
A. Letak Geografis.....	26
B. Keadaan Penduduk.....	27
1. Pendidikan.....	28
2. Mata Pencarian.....	29
3. Kehidupan Keberagamaan.....	31
C. Peta Basis Kultur Abangan, NU dan Muhammadiyah.....	33

1. Basis Kultur Abangan.....	36
2. Basis Kultur NU.....	37
3. Basis Kultur Muhammadiyah.....	40
D. Tempat Pindah Partai.....	43
E. Perolehan Suara	44

BAB III. PRIMORDIALISME POLITIK DAN TEORI PERTUKARAN

A. Pembatasan Istilah.....	45
1. Primordialisme Politik.....	45
2. Masyarakat Santri Pemilih.....	47
B. Kultur dan Ideologi Politik.....	51
C. UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.....	55
D. Peter Blau dan Teori Pertukaran.....	57
1. Biografi Intelektual.....	57
2. Beberapa Karya.....	58
3. Teori Pertukaran.....	58
E. Proposisi Pertukaran dari Homans.....	63

BAB IV. MOTIF DAN PROSES PINDAH PARTAI

A. Pengantar.....	69
B. Hasil Temuan di Lapangan.....	70
1. Motif dan Proses Pindah Partai dari PKB ke PKPB oleh Warga Santri NU Desa Ngawu.....	71
2. Motif dan Proses Pindah Partai dari PKB ke PKS oleh Warga Santri NU Desa Getas.....	80

3. Motif dan Proses Pindah Partai dari PKB ke PAN oleh Warga Santri NU Desa Banyusoco dan Desa Bleberan.....	89
4. Motif dan Proses Pindah Partai dari PAN ke PKS oleh Warga Santri Muhammadiyah Desa Playen.....	95

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA.....	101
----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE.....	I
------------------------------	----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman Orde Baru merupakan zaman pencarian identitas bangsa atau dengan kata lain masa untuk mencari konsep baru yang dirasa dapat mengantarkan Indonesia dari sejarah pahit selama pemerintahan Orde Lama. Pembangunan merupakan strategi Orde Baru untuk bangkit dari keterpurukan itu.

Persoalan yang muncul adalah konsep pembangunan yang digunakan Orde Baru menggunakan konsep Barat, yaitu modernisasi. Padahal konsep modernisasi diartikan sebagai perbaikan umum dalam standar hidup atau sebagai sarana memperkuat negara, terutama melalui proses industrialisasi, yang mengikuti pola seragam dari satu negara dengan negara lainnya.¹ Dari pemahaman di atas, Orde Baru memposisikan diri atau peran pemerintah Orde Baru menjadi subjek pembangunan yakni memperlakukan rakyat sebagai objek pembangunan.

Paradigma Modernisasi merupakan konsep pembangunan yang digunakan oleh negara-negara Barat, dan secara tidak langsung pembangunan di Indonesia juga menggunakan Paradigma Modernisasi, dengan istilah “developmentalism”. Asumsi dasar modernisasi dikaitkan dengan proses

¹ Mansour Fakih. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 35

perubahan dari struktur yang disebut tradisional menuju struktur yang dikenal sebagai modern.²

Ada beberapa unsur dalam teori modernisasi. Salah satunya adalah aliran yang menggunakan metafora pertumbuhan, seperti dalam organisme, untuk menjelaskan modernisasi. Bagi penganut paham ini, pembangunan dilihat dari perspektif evolusioner yakni merupakan perjalanan panjang dari keadaan tradisional ke modern.³ Paham modernisasi yang kedua adalah paham yang dikembangkan dari sudut pandang sosiologis oleh David McClelland yang mendasarkan penafsirannya pada karya Weber.⁴

Dengan demikian, sesungguhnya modernisasi serupa dengan westernisasi yang didasarkan pada paham kapitalisme. Dengan kata lain, konsep pembangunan Indonesia mengikuti konsep pembangunan model Barat. Konsep pembangunan model Barat merujuk pada paham modernisasi. Paham modernisasi yang diantaranya teori pertumbuhan dan teori etika protestan dan semangat kapitalisme, sesungguhnya bias Barat yang didasarkan pada paham

² *Ibid.*, hlm. 37

³ W.W. Rostow adalah tokoh dari paham ini dimana perubahan masyarakat akan berjalan secara bertahap dari tradisi modernitas melalui proses pembangunan. Pembangunan akan terjadi secara hampir otomatis dari akumulasi modal, karenanya ditekankan perlunya bantuan atau hutang dan perdagangan luar negeri. *Ibid.*, hlm. 38

⁴ Bagi David McClelland menanggapi karya Weber bahwa apa yang ada dibalik etika protestan tersebut kuncinya adalah sifat personalitas, yang disebut sebagai kebutuhan berprestasi. Penjelasan atas dunia ketiga terbelakang, sebab mereka tidak mempunyai dorongan atau motivasi untuk meraih kebutuhan berprestasi ini. Yang dimaksud *prototipe* masyarakat berprestasi sebenarnya adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri perilaku seperti yang ada dalam masyarakat kapitalis. *Ibid.*, hlm. 39

kapitalisme. Artinya kapitalisme, developmentalisme atau istilah pembangunan Indonesia, westernisasi dan modernisasi merupakan satu arti.⁵

Adanya unsur westernisasi merupakan satu aspek yang tidak mungkin dihindarkan di dalam modernisasi. Seiring pula dengan tujuan pembangunan Indonesia pada fase awal Orde Baru, Indonesia melakukan pemodernan melalui lima aspek yaitu pendidikan di negara-negara Barat, bantuan pemberian saham dan teknik, penanaman modal asing, pemberian saham, pengaruh media massa dan pemindahan struktur lembaga dan ekonomi.⁶

Dengan demikian tugas yang dibebankan kepada Orde Baru adalah berat sekali. Oleh sebab itu memerlukan konsepsi yang tepat, strategi yang cocok, institusi yang kokoh dan kepemimpinan yang didukung oleh semua pihak agar tidak mengulangi kegagalan yang telah dialami oleh Orde Lama serta memperoleh bantuan keuangan dari negara-negara Barat. Ini juga berarti bahwa munculnya Orde Baru merupakan satu peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia yang akan menentukan corak dan keberadaannya di masa mendatang. Apalagi sebagai bangsa yang lama mengalami penjajahan dan berpenduduk banyak dengan susunan masyarakat yang multi etnis, maka pemilihan corak sistem politik dan kebijakan yang tepat merupakan satu hal

⁵ Dalam *Encyclopedia of The Social Sciences*, modernisasi mempunyai arti sekulerisasi, komersialisasi, industrialisasi, peningkatan standar hidup materi, penyebaran melek huruf, pendidikan, media massa, persatuan nasional dan perluasan keterlibatan rakyat dalam partisipasi. *Ibid.*, hlm. 40

⁶ M. Ruslim Karim. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 53

yang penting. Jenis sistem politik juga ditentukan oleh faktor historis dan primordialistik.

Konsep *nation-state* yang digunakan Indonesia pada masa itu adalah berasal dari Barat, terutama mengenai kebersamaan rakyat atau kebangsaan, wilayah kekuasaan negara dan kedaulatan rakyat.⁷ Ciri nasionalisme dan kedaulatan rakyat ini mempunyai dua implikasi yaitu rakyat dari waktu ke waktu akan mengurangi ketergantungan atau hubungannya dengan pertalian kekeluargaan yang bersifat tradisional dan seiring dengan asas kedaulatan rakyat, maka rakyat mempunyai kekuatan untuk menuntut hak-hak mereka agar diikutsertakan dalam segala proses politik dan dalam pembuatan keputusan politik.

Konflik kepentingan terjadi antara elit tradisional dengan elit baru yang dibuat oleh rezim Orde Baru yaitu ABRI, teknokrat dan birokrat. Elit baru itu di masa Orde Baru memainkan peran yang sangat penting. Ini merupakan sesuatu yang wajar. ABRI dan birokrat merupakan kekuatan yang selalu wujud di dalam sejarah politik Indonesia. Begitu juga teknokrat, telah berperan sejak masa pergerakan awal abad ke-20. Persoalannya adalah elit baru tersebut memiliki kecenderungan untuk meminggirkan elit tradisional.

Modernisasi dan pembangunan ekonomi tampaknya tidak terlalu memerlukan pertimbangan dari kelompok elit tradisional atau salah satu kesan negatif dari modernisasi dan pembangunan ekonomi Orde Baru adalah

⁷ *Ibid.*, hlm. 54

peminggiran elit tradisional.⁸ Adapun kecenderungan elit baru untuk meminggirkan elit tradisional menggunakan cara institusionalisasi dengan pembentukan partai-partai politik, mengekalkan atau membiarkan rakyat mengambang (*floating mass*), dan mengawasi setiap jenis perwakilan politik, termasuk kelompok intelektual, pemuda, mahasiswa dan media massa. Dalam konteks ini, langkah memasukkan Angkatan Darat, kelompok-kelompok profesional, dan pelaku bukan partai adalah jelas dimaksudkan untuk menentang elit kelompok muslim.

Adapun strategi untuk melemahkan partai politik dengan cara memojokkan, menjinakkan dan akhirnya ditinggalkan orang, yaitu dengan cara menekankan pembangunan ekonomi secara besar-besaran sambil mendepolitisasikan suasana politik yang tegang. Dengan begitu partai politik tidak dapat melakukan perbincangan ideologis, melainkan ditarik ke dalam kerangka yang diciptakan oleh pemerintah yang menekankan pada kebijakan. Walaupun terdapat ideologi, hanya berasaskan pada developmentalisme. Oleh sebab itu terdapat empat tindakan yang dilakukan Orde Baru untuk menciptakan keamanan internal yaitu manipulasi-manipulasi politik, pengawasan penduduk, menyapu bersih lawan yang memberontak, dan ketakutan yang direkayasa.

Khususnya untuk menghadapi kelompok Islam, terdapat tiga langkah yang diambil Orde Baru yaitu kampanye politik, menarik mundur komunitas beragama menurut aturan baru, dan demonstrasi kekerasan menurut cara yang

⁸ *Ibid.*, hlm. 56

biasa. Tindakan seperti ini seiring dengan kecenderungan Orde Baru yang selalu menekan semua corak partisipasi rakyat.

Pada pemerintahan periode 1999-2004 atau era yang semula diharapkan merupakan era reformasi yang menjanjikan berbagai perubahan, ternyata jauh dari harapan atau tidak jauh beda dengan pemerintahan Orde Baru.⁹ Keinginan untuk hidup dalam negeri yang semakin adil dan makmur tidak terjadi. Bahkan sebaliknya, misalnya indikator kinerja yang terkait dengan bidang ekonomi sejak era reformasi masih jauh di bawah kinerja Orde Baru. Praktek-praktek yang menurunkan daya saing nasional berupa korupsi, kolusi dan nepotisme semakin meluas. Jika pada masa Orde Baru KKN terkonsentrasi di eksekutif, dan juga yudikatif, sekarang meluas ke legislatif.

Di Yogyakarta ditemukan beberapa kasus praktek KKN pada aras legislatif, seperti yang diberitakan koran "Sosok" tentang daftar calon dewan maupun mantan dewan yang akan mencalonkan diri menjadi anggota dewan di wilayah Yogyakarta pada pemilu 2004. Praktek KKN menunjukkan bahwa pada periode Megawati tahun 1999-2004 telah gagal mengantarkan Indonesia pada hakikat reformasi, dan juga menunjukkan bahwa sebetulnya sebagian masyarakat masih berat untuk meninggalkan romantisme Orde Baru.

Gejala politik yang bisa disebut demokrasi semu, kepalsuan demokrasi atau gejala pragmatisme politik bagi mayoritas pemilih bagaimanapun

⁹ Edy Suandi Hamid "Masalah Utama Ekonomi Indonesia: Tantangan Bagi Rezim Pemerintahan 2004-2009" dalam jurnal *UNISIA*, edisi April-Juni 2004, hlm. 110

kecenderungan tersebut merupakan fakta yang penting dicermati semua pihak, terutama elit partai dan semua kekuatan bangsa ini.¹⁰

Kelompok santri atau nasionalis yang dipandang sebagai kelompok paling sadar atas pilihan politiknya di atas basis ideologi Islami, tidak seluruhnya terlihat di lapangan. Contoh paling jelas ialah sulitnya bagi partai-partai yang mengusung romantisme Masyumi memperoleh dukungan signifikan dalam pemilu demokratis pasca reformasi.¹¹ Hasil survei Lembaga Survei Indonesia juga menunjukkan kecenderungan romantisme Orde Baru bagi sebagian pemilih. Hal ini bisa dilihat dari perolehan suara Golkar yang dalam waktu singkat menduduki urutan kedua setelah PDI-P pada salah satu kabupaten di Yogyakarta, yaitu Kabupaten Gunungkidul.

Selain Yogyakarta sebagai aras regional, pada wilayah lokalpun juga ditemukan gejala pragmatisme politik pada sebagian masyarakat, khususnya masyarakat santri. Seperti kata Munir, bahwa meskipun kelompok santri sejak dulu dianggap sebagai kelompok jujur, kenyataannya tidak semua yang ditemukan di lapangan seperti itu. Yang terjadi adalah banyak ditemukannya kultur-kultur warisan Orde Baru yang masih melekat pada sebagian masyarakat.

Pemilu 2004 yang lalu di Kecamatan Playen Gunungkidul Yogyakarta, dapatlah diamati secara jelas atas fenomena kecenderungan masyarakat untuk

¹⁰ Abdul Munir Mul Khan "Politik Santri dalam Daur Ulang Kontrak Sosial" dalam jurnal *UNISIA*, edisi April-Juni 2004, hlm. 146

¹¹ Contohnya adalah pada Kabupaten Gunungkidul dimana PAN, PKB dan PPP pada pemilihan umum 1999 menempati urutan setelah PDI-P dan Golkar

berpaling dari partai semula, yaitu kasus perpindahan partai. Dalam penelitian ini, difokuskan pada kasus perpindahan partai oleh sebagian warga santri dari organisasi Nahdlatul Ulama yang tidak lagi memilih PKB, begitu juga dengan sebagian warga santri dari organisasi Muhammadiyah yang juga berpaling dari PAN. Lebih jelasnya tentang peta pindah partai, dapat dilihat pada tabel berikut.¹²

Tabel. I
Dinamika Pindah Partai

No	Desa	Warga	Pemilihan Umum 1997	Pemilihan Umum 1999	Pemilihan Umum 2004
1	Ngawu	NU	Golkar	PKB	PKPB
2	Getas	NU	Golkar	PKB	PKS
3	Playen	Muhammadiyah	PPP	PAN	PKS
4	Bleberan	NU	Golkar	PKB	PAN
5	Banyusoco	NU	Golkar	PKB	PAN

Kasus perpindahan tersebut sebetulnya meruntuhkan tesis lama, dimana relasi elit-massa dalam tubuh organisasi NU maupun Muhammadiyah sebetulnya mempunyai ikatan emosional yang sangat kuat, sebab diikat oleh tali hegemoni, dalam lima bidang yaitu ekonomi, sosial-politik, pendidikan, pergerakan dan pemikiran keislaman,¹³ dimana inti dari kelima bidang

¹² Data tersebut diperoleh dari hasil interview dengan saudara Ngabadi pada tanggal 5 November 2005 di rumahnya

¹³ Ide tersebut pernah dilontarkan oleh Amien Abdullah ketika seminar nasional di UMY tahun 1994 tentang reorientasi wawasan keislaman Muhammadiyah dan NU. Ide tersebut dilontarkan, sebab Amien melihat ada persoalan yang mendalam dibalik stagnasi gerakan Muhammadiyah dan NU, yaitu epistemologi keislaman yang digunakan Muhammadiyah dan NU masih dalam telikungan hegemoni, eksploitasi yang ditujukan pada pengikutnya, sehingga pengikut Muhammadiyah dan NU sulit menjadi calon-calon *leader* yang humanis, kritis, akibat hegemoni organisasi yang ditanamkan dalam doktrin-doktrin dari kelompok elit. Lebih lanjut, baca hasil seminar nasional yang telah dibukukan, yaitu Ilyas, Yunahar, dkk. *Muhammadiyah dan NU: Reorientasi Wawasan Keislaman*. (Yogyakarta: LPPI UMY, 1993), hlm. 15

tersebut -yaitu pemikiran keislaman atau epistemologi yang digunakan-menutup ruang akan masuknya kajian khazanah filsafat pemikiran Islam secara kritis-analitis dan rasional-empatik, sehingga aspek yang sebetulnya “tidak memanusiakan manusia” secara implisit nampak kelihatan pada pengikut Muhammadiyah dan NU, seperti ketergantungan warga pada sang elit dalam beberapa persoalan kehidupan, merupakan kasus kecil aspek dehumanisasi.

Pada bidang sosial-politik seperti halnya tradisi pesta demokrasi atau pemilihan umum merupakan aktualisasi umat Islam terhadap ajaran agama, dimana politik dijadikan sebagai ruang jihad yang sangat efektif pada aras struktural.¹⁴

Jika demikian, seiring dengan tumbanganya Orde Baru, maka kelompok santri yang dianggap paling sadar atas pilihan politiknya di atas basis ideologi Islami, maka di era reformasi ini kondisi berbalik atau basis kultur maupun ideologi politik masyarakat santri banyak diwarnai oleh ideologi developmentalisme atau pembangunanisme Orde Baru.

Hal itu disebabkan partainya warga santri NU Playen pada pemilu 1997 ke bawah adalah Golkar, yang tradisi pemilu atau kampanyenya sangatlah familiar dengan *money politics*, sehingga secara tidak langsung pandangan politik warga tentang pemilu adalah pemilu dianggap sama dengan uang. Selain lewat jalur politik, tradisi serba uang telah membudaya lewat

¹⁴ Munculnya PAN sebagai ruang politik Muhammadiyah ataupun PKB sebagai ruang politik NU, merupakan tindak lanjut dari hasil seminar nasional di UMY atas pentingnya pendirian wadah politik untuk menampung aspirasi politik warga Muhammadiyah maupun NU, yang disampaikan oleh Abdurrahman Wahid dan Dien Syamsuddin. *Ibid.*, hlm. 17

jalur administrasi yang diajari oleh aparat atau birokrasi desa masa Orde Baru dengan prosedur yang serba uang, sedangkan partainya warga santri Muhammadiyah pada pemilu 1997 ke bawah adalah PPP.

Ideologi developmentalisme sebetulnya mewarnai mayoritas warga Playen, baik NU maupun Muhammadiyah. Adapun pelaku pindah partai dari warga santri Muhammadiyah terpelajar tidak termasuk atau tidak terkena hegemoni kultural dan politik Orde Baru, sebab ketika masa kejayaan Orde Baru kelompok generasi muda terpelajar masih di bawah usia.

Berdasarkan data di lapangan bahwa di wilayah tersebut pada pemilihan umum 1999 PKB menempati urutan ketiga setelah Golkar, PAN menempati urutan keempat setelah PKB, sedangkan partai dominan adalah PDI-P sebab warna Islam pada mayoritas masyarakat Gunungkidul adalah Islam Abangan dan kelompok santri merupakan kelompok minoritas. Jadi sudah menjadi suatu kewajiban jika mayoritas masyarakat Playen memilih partai yang tidak berlabel Islam.¹⁵

Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh pada pemilihan umum 2004 menunjukkan perubahan drastis dalam PKB dan PAN, dimana PAN menempati urutan ketiga setelah Golkar, PKB menempati urutan keempat setelah PAN, sedangkan partai dominan masih tetap PDI-P, persoalannya adalah munculnya PKPB dan PKS yang memperoleh urutan kelima dan

¹⁵ Litbang Kompas. *Peta Pemilihan Umum 1999-2004*. (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 364

ketujuh, sehingga mampu menggeser posisi PPP yang pada pemilu 1999 pada peringkat lima.¹⁶

Fenomena tersebut menarik dalam riset ini, yaitu kelompok santri tidak semuanya dianggap sebagai kelompok paling sadar atas pilihan politiknya di atas basis ideologi Islami. Untuk itu, tesis penyusun bahwa penyimpangan perilaku politik santri mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan sejarah Orde Baru yang selama ± 32 tahun telah menghegemoni *mindset* kelompok muslim, khususnya kelompok santri NU yang mengusung nilai-nilai budaya tradisional.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam riset ini, antara lain:

1. Motif apa yang mempengaruhi masyarakat santri di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul untuk berpindah partai politik?
2. Bagaimana proses terjadinya perpindahan partai politik pada masyarakat santri tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui motif pindah partai
2. Untuk mengetahui proses pindah partai

Adapun manfaat dari riset ini adalah sebagai masukan bagi kegiatan akademik, khususnya di bidang sosial politik maupun keagamaan. Selain itu,

¹⁶ Data tersebut diperoleh dari kantor KPU Gunungkidul pada tanggal 02 Januari 2005

sebagai masukan dan sumbangan bagi masyarakat santri setempat untuk menumbuhkan kesadaran berperilaku politik yang baik.

D. Tinjauan Pustaka

Riset tentang pergeseran kultur politik primordial masih belum begitu banyak disentuh, salah satu di antaranya yakni karya Munir Mul Khan berjudul “Moral Politik Santri”¹⁷ merupakan buku tentang perilaku politik santri pada pemilu 2004. Buku itu membahas mengenai perilaku politik masyarakat santri secara umum tentang pergeseran perilaku politik dari kultur primordial menuju kultur rasional. Meskipun kultur rasional, kultur yang dibangun bermuatan ideologis yang tidak sesuai dengan etika politik Islam, dalam konteks ini kultur politik yang dibangun bermuatan politis pragmatis. Dengan bentuk anomali seperti itulah, Munir mencoba menelusuri jejak ideologis yang mendominasi *mindset* masyarakat santri dalam berperilaku politis pragmatis.

Juga tulisan Mustafied dalam Jurnal Tradem berjudul “Akar Struktural dan Teologis Pragmatisme Politik Ulama”¹⁸ merupakan analisis historis yang memaparkan alasan logis atas kebanyakan para elit Islam yang terbawa kultur politis pragmatis. Dalam analisis itu, ia menunjukkan bahwa latar belakang ideologis yang menjadikan elit Islam berperilaku politis pragmatis adalah sebab terdapat akar struktural yaitu sisa-sisa hegemoni developmentalisme Orde Baru serta imperialisme kolonial yang sudah membudaya pada hampir

¹⁷ Abdul Munir Mul Khan. *Moral Politik Santri: Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas*. (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 351

¹⁸ Mustafied, “Akar Struktural dan Teologis Pragmatisme Politik Ulama” dalam *Tradem*, edisi VII Februari-April 2005, hlm. 79

seluruh elemen masyarakat, khususnya elemen santri. Di samping itu juga terdapat akar teologis yang mendukung untuk berperilaku politis pragmatis yaitu pengaruh doktrin Sufisme dan teologi Jabariyah, dimana Jabari membuahakan pikiran mendapat rizqi tak terduga tanpa disertai daya kritis dalam bentuk semboyan *min haisu la yahtasib* serta Sufisme dengan ajaran zuhudnya menumbuhkan etos kerja yang berpijak pada manajemen *lillahi ta'ala* berdampak pada usaha mencari nafkah secukupnya.

Di samping itu, riset Musa Asy'ari bersama tim lain berjudul "Persepsi Penduduk Jawa tentang Presiden pada Pemilu 2004" menjelaskan bahwa corak orientasi politik mayoritas penduduk Jawa dalam memilih calon presiden 2004 masih berbasis kultur primordial, meskipun pemilu 2004 terdapat dua kekuatan politik baru yaitu PD dan PKS.

Juga ada disertasi Mansour Fakih "Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia" menggambarkan kekuatan hegemoni Orde Baru yang mampu meluluhlantahkan kultur Islam yang selama ini dianggap telah mapan, khususnya kelompok LSM -yang pada waktu itu merupakan salah satu agen kontrol gerak pemerintah- tidak luput dari sasaran hegemoni.

Dari beberapa literatur yang berhasil didapatkan masih belum terdapat riset yang secara khusus mengupas persoalan perilaku politik santri dalam skala mikro pada wilayah tersebut. Namun dengan melihat fenomena yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pergeseran kultur politik primordial masyarakat santri merupakan perilaku rasionalitas instrumental yang

melibatkan alat dan tujuan seseorang.¹⁹ Dengan kata lain meskipun perilaku itu bersifat rasional, namun rasional yang dibangun tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan nalar Qur'ani yang mempunyai paradigma sendiri dalam berpolitik.

Konsekuensinya, berbagai konflik sosial akan selalu turut mewarnai fenomena perpindahan partai primordial, salah satunya adalah konflik internal partai, antara elit partai dengan masyarakat santri pemilih. Riset ini mencoba membaca implikasi logis dari proses pindah partai atau konflik yang muncul di permukaan.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertukaran. Teori pertukaran masuk pada paradigma perilaku sosial.²⁰ Perhatian khusus paradigma ini ialah imbalan-imbalan yang mengundang perilaku-perilaku yang disukai, dan hukuman-hukuman yang menghambat perilaku-perilaku yang tidak diinginkan.²¹ Selain teori pertukaran, yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial adalah teori sosiologi behaviorial. Teori pertukaran sendiri ada dua tokoh, yaitu George Homans dan Peter Blau.

Menurut Blau, proses pertukaran atau proses sosial melahirkan gejala yang muncul dalam bentuk struktur sosial yang lebih kompleks. Untuk itulah

¹⁹ Rasionalitas instrumental merupakan konsepnya Weber yang dipahami sebagai perilaku rasional yang ditujukan pada pencapaian materi mempunyai motivasi pada pencapaian ekonomi

²⁰ Riyadi Soeprapto. *Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 89

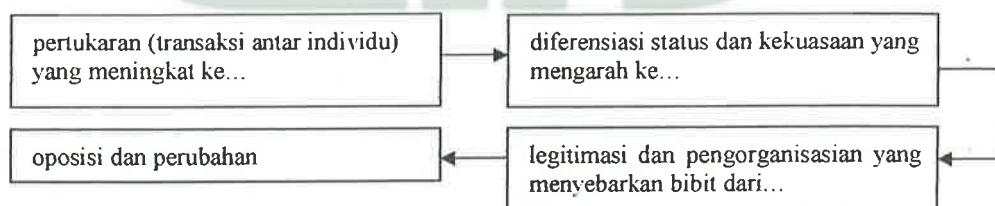
²¹ *Ibid.*, hlm. 90

teorinya memperlihatkan tradisi ideal dari tingkat mikro (proses sosial) ke tingkat makro (struktur sosial). Namun pertukaran yang dimaksud hanya sebatas ada tidaknya reaksi penghargaan atau pertukaran dapat berlanjut jika ada reaksi. Struktur sosial muncul dari interaksi, tetapi setelah muncul struktur tersebut terpisah keberadaannya dan mempengaruhi proses interaksi.

Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana cara kehidupan sosial tersusun menjadi struktur asosiasi yang makin kompleks. Blau bermaksud menganalisis struktur sosial yang lebih kompleks. Menurut Blau tujuan utama ilmu Sosiologi yang mempelajari interaksi tatap muka adalah untuk meletakkan landasan guna memahami struktur sosial yang mengembangkan dan menimbulkan kekuatan sosial yang menandai perkembangannya itu.

Teorinya memusatkan perhatian pada proses pertukaran yang mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun antar kelompok. Terdapat empat langkah pertukaran, yaitu (1) pertukaran atau transaksi antar individu yang meningkat ke, (2) diferensiasi status dan kekuasaan yang mengarah ke, (3) legitimasi dan pengorganisasian yang menyebarkan bibit dari, (4) oposisi dan perubahan. Sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Bagan. I
4 Proses Pertukaran

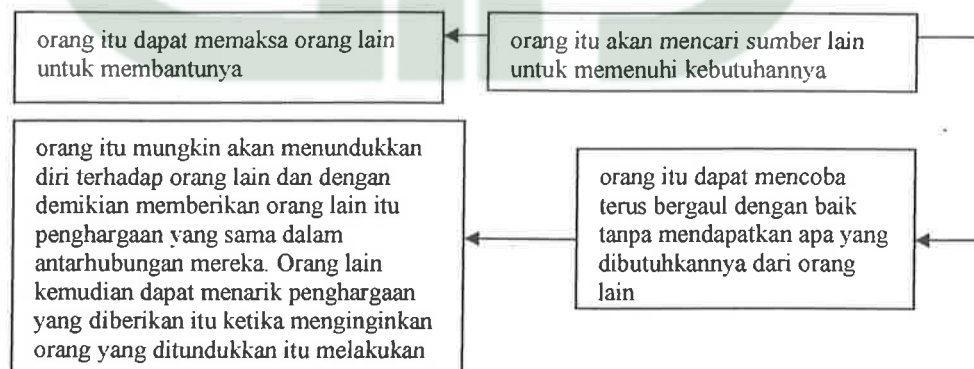


Orang saling tertarik sebab berbagai alasan yang membujuk untuk membangun kelompok sosial. Segera setelah ikatan awal dibentuk, *reward* yang saling mereka berikan akan membantu mempertahankan dan meningkatkan ikatan. Situasi sebaliknya pun mungkin terjadi, karena *reward* tidak mencukupi, ikatan kelompok dapat melemah atau bahkan hancur.

Reward yang dipertukarkan dapat berupa sesuatu yang bersifat intrinsik seperti cinta, kasih sayang, dan rasa hormat, atau sesuatu yang bernilai ekstrinsik seperti uang dan tenaga kerja fisik. Orang yang terlibat dalam ikatan kelompok tak selalu dapat saling memberikan *reward* secara setara. Bila terjadi ketimpangan dalam pertukaran *reward*, maka akan timbul perbedaan kekuasaan dalam kelompok. Orang yang terlibat dalam ikatan kelompok tak selalu dapat saling memberikan *reward* secara seimbang.

Bila terjadi ketimpangan dalam pertukaran *reward*, maka akan timbul perbedaan kekuasaan dalam kelompok. Bila satu orang membutuhkan sesuatu dari orang lain, tetapi tidak memberikan apapun yang sebanding sebagai tukarannya, maka akan tersedia empat kemungkinan. Adapun empat kemungkinan tersebut, antara lain:

Bagan. II
4 Kemungkinan Pertukaran Tak Sebanding



Gambaran tentang interaksi tersebut berangkat dari ketertarikan individu pada suatu kelompok, sebab *reward* lebih banyak. Karena tertarik, maka ingin diterima. Untuk dapat diterima harus menawarkan *reward*. *Reward* tersebut sebagai pemberian kesan, dengan menunjukkan bahwa anggota yang bergabung akan mendapat keuntungan.²²

Upaya pendatang baru untuk mengesankan anggota kelompok umumnya menimbulkan persatuan kelompok, tetapi persaingan, dan akhirnya diferensiasi sosial, akan tetapi ketika terlalu banyak orang yang mencoba saling memberikan kesan dengan kemampuan mereka menawarkan *reward*.

Dalam ruang praksis, teori tersebut sangat berguna dalam analisis, dimana warga santri NU atau pengikut PKB yang berpindah partai sebab *reward* yang diberikan partai lain lebih besar, yaitu berupa sumbangan fisik. Sebaliknya PKB sama sekali tidak memberikan *reward* pada warga NU, sebab pandangan calon dewan, bahwa pengikut PKB masih terbawa pola lama, dimana tradisi *sami'na wa ata'na* masih dipegang teguh, padahal kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya.

Menurut teori tersebut, perpindahan pengikut PKB ke PAN, PKS atau PKPB umumnya menimbulkan persatuan kelompok, yaitu antara pengikut PKB yang berpindah partai dengan partai barunya. Setelah itu, muncul persaingan antar partai dalam memberikan *reward*, dan setelah terjadi persaingan besar-besaran *reward*, maka yang terjadi adalah diferensiasi sosial atau pengikut partai akan mudah labil atau mudah pindah partai sebab masing-

²² *Ibid.*, hlm. 381

masing partai mencoba memberikan *reward* lebih banyak sebagai pemberian kesan dengan menunjukkan bahwa pengikut yang bergabung akan mendapat keuntungan.

Sebaliknya, jika terjadi pertukaran tak sebanding antara pengikut dengan partai, -seperti pengikut PKB sudah terlanjur masuk PKPB karena dijanjikan dengan sejumlah *reward*, dan setelah PKPB berhasil memperoleh kursi, janji tersebut ternyata tidak terealisasi- maka pengikut itu mungkin akan menundukkan diri terhadap partai lain, dan dengan demikian partai lain itu memberikan penghargaan yang sama dalam hubungan antar mereka.

Seluruh proses itulah, menurut teori Blau disebut empat langkah pertukaran, yang dalam konteks penelitian dapat digambarkan, (a) transaksi antara pengikut dengan partai, dimana pengikut mau memberikan *cost* jikalau suatu partai dapat memberikan *reward*; (b) semakin banyak yang memberikan *reward* pada pengikut, dapat menimbulkan diferensiasi sosial, atau pengikut menjadi labil untuk tetap pada partai semula; (c) pindahnya partai akibat pertukaran tak sebanding menimbulkan legitimasi baru oleh pengikut; (d) pengikut yang pindah partai akhirnya menjadi oposisi dengan partai semula.

Namun dalam kaitannya dengan pembentukan struktur sosial atau gerak mikro-makro, yang menentukan adalah nilai, apakah nilai tersebut lebih cenderung partikularistik atau universalistik ketika warga memandang sebuah partai. Perspektif warga NU tentang PKB dan NU adalah sebuah hal yang berbeda, dimana NU merupakan organisasi sosial keagamaan berisi doktrin *ahlussunnah wal jama'ah* yang menciptakan nilai partikularistik dan bersifat

ekstrinsik. Sedangkan PKB merupakan partai politik yang mencerminkan nilai universalistik berupa kepentingan ekonomi atau *reward* yang bersifat intrinsik.²³

Pandangan politik seperti itu berdasarkan nilai universalistik dalam tradisi pemilu yang identik dengan adanya *money politics*²⁴ atau sumbangan fisik atau kesejahteraan rakyat. Jika PKB diposisikan sebagai nilai partikularistik atau dengan *reward* yang bersifat ekstrinsik, maka kecil kemungkinan solidaritas antara NU dan PKB akan terwujud, sebab sebuah partai identik dengan nilai universalistik, dan warga akan mencari nilai-nilai tersebut daripada berdiam diri pada tradisi partikularistik yang tidak menguntungkan secara materi.

Adapun teorinya Homans dalam karyanya *Social Behavior: its Elementary Forms*, ia mengemukakan bahwa pola-pola pertukaran harus dianalisis menurut motif-motif dan perasaan-perasaan mereka yang terlibat

²³ Nilai universalistik sebagai media pertukaran, sedangkan nilai partikularistik sebagai media integrasi dan solidaritas. Nilai yang menentukan eksistensi menuju struktur sosial yang kokoh adalah nilai partikularistik, sebab nilai partikularistik menciptakan perasaan-perasaan solidaritas dan integrasi antara orang-orang yang memiliki sifat-sifat tertentu yang sama. Sifat-sifat ini dapat mencakup latar belakang ras dan etnis, status atau pekerjaan yang sama, agama yang sama, tempat tinggal dalam suatu komunitas tertentu, atau kepentingan bersama lainnya. Intinya nilai partikularistik dikatakan sebagai media solidaritas, sebab adanya persamaan basis kultur. Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi...*, hlm. 94

²⁴ Warga santri NU sebetulnya sudah familiar dengan tradisi *money politics* pada pemilu 1997 ke bawah yang diajari oleh Orde Baru. Partainya warga santri NU Gunungkidul, khususnya Playen pada pemilu 1997 ke bawah adalah Golkar. Menurut karangan Indra Ismawan bahwa Golkar selalu menggunakan uang sebagai instrumen penting untuk mendapatkan dukungan politik dari berbagai segmen politik. Karena itu dana tersebut juga didistribusikan kepada berbagai segmen penting dalam masyarakat, seperti tokoh agama, ulama atau tokoh kepemudaan dan lain-lain. Dalam level institusional, hal itu misalnya dilakukan dengan pembangunan sarana-sarana ibadah. Sementara pada level individual, hal itu dilakukan misalnya dengan pengiriman seorang tokoh untuk naik haji, seperti yang populer dengan istilah Haji Abubakar (atas budi baik Golkar). Indra Ismawan. *Money Politics, Pengaruh Uang dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hlm. 1

dalam transaksi itu. Ia mengemukakan bahwa alasan sering terjadinya perkawinan dengan putri saudara ibu hanyalah bahwa individu itu secara emosional merasa lebih dekat dengan ibunya daripada dengan bapaknya. Penjelasan bahwa pola perkawinan mengikuti garis ikatan emosional yang paling kuat.

Tentang dinamika perilaku kelompok kecil, terdapat tiga konsep utama yaitu kegiatan, interaksi dan perasaan.²⁵ Ketiga elemen tersebut membentuk suatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Maksudnya kegiatan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pola-pola interaksi dan perasaan-perasaan. Interaksi akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan dan perasaan-perasaan, dan perasaan akan berhubungan timbal balik dengan kegiatan dan interaksi. Kalau salah satu elemen tersebut berubah, kedua yang lainnya mungkin berubah.

Beberapa dari kegiatan, interaksi dan perasaan yang terjadi dalam kelompok merupakan hasil dari tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada kelompok itu dari lingkungannya atau strategi-strategi untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan itu. Kegiatan, interaksi dan perasaan tertentu ini dilihat sebagai sistem eksternal.

Jadi anggota suatu kelompok industri akan harus memenuhi pengaturan organisasi dan menggunakan secara tepat perlengkapan teknis yang ada hanya dengan maksud untuk mempertahankan keanggotaannya

²⁵ Kegiatan adalah perilaku aktual yang digambarkan pada tingkat yang sangat kongkret. Interaksi adalah kegiatan apa saja yang merangsang atau dirangsang oleh kegiatan orang lain. Perasaan didefinisikan sebagai suatu tanda-tanda yang bersifat eksternal atau yang bersifat perilaku yang menunjukkan suatu keadaan internal. *Ibid.*, hlm. 61

dalam kelompok itu. Teknologi yang termasuk di situ, dan struktur organisasi yang lebih besar, akan dipandang sebagai bagian lingkungan kelompok itu.

Tetapi anggota kelompok jarang membatasi kegiatan, interaksi, dan perasaannya pada apa yang diberikan oleh lingkungan atau yang hanya untuk bisa bertahan hidup saja. Sebaliknya, mereka mengembangkan atau memperluas kegiatan, interaksi dan perasaannya di atas persyaratan minimal untuk hidup. Misalnya anggota kelompok kerja yang harus berinteraksi untuk melaksanakan tugasnya mungkin menjalin persahabatan intim, dan sesudah kerja mereka minum dan main bowling bersama. Kegiatan, interaksi dan perasaan tambahan ini dilihatnya sebagai sistem internal.²⁶

Motif pindah partai sebab tidak adanya konsolidasi dalam teorinya Homans disebabkan lemahnya ikatan emosional atau hubungan antara PKB dan NU tidak terjalin secara harmonis. Namun pada aspek kultural, warga tetap menggunakan pola budaya NU, dalam kesehariannya, antara kegiatan, interaksi dan perasaan antara elit dan warga selalu dijalin dengan baik.

Berbeda dengan aspek politik atau dalam hal pemilihan PKB, tidak adanya hubungan secara timbal balik dan terorganisir antara kegiatan, interaksi dan perasaan menyebabkan pindahnya warga atau berpalingnya warga dari partainya sendiri.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 62

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu, cara kerja agar kegiatan bisa terlaksana secara rasional dan terarah untuk mendapatkan hasil yang optimal, sedangkan menurut Koentjaraningrat, metode artinya cara kerja di dalam mengadakan suatu riset agar dapat memahami obyek yang menjadi sesuatu ilmu yang bersangkutan.²⁷ Dalam riset ini, digunakan metodologi riset kualitatif.

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *depth* interview dan observasi partisipatoris.

- a. Interview. Interview adalah tanya jawab dengan berhadapan muka untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden.²⁸ Hal ini dilakukan guna memperoleh data langsung dari sumber-sumber yang dianggap berkompeten dalam masalah riset ini dan memiliki informasi serta data-data yang dibutuhkan. Dalam hal ini, dilakukan interview terhadap elit partai, masyarakat santri pemilih serta elit organisasi.

²⁷ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 461

²⁸ Koentjaraningrat. *Metode-Metode Riset Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129

- b. Observasi. Observasi adalah pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁹ Dalam hal ini bertujuan untuk mengamati fenomena-fenomena sosial politik yang sedang dilakukan dan memberikan gambaran obyektif tentang kasus perpindahan partai primordial di wilayah Kecamatan Playen.

2. Pengolahan Data

Menurut Hadari Nawawi terdapat empat metode analisis yaitu deskriptif, filosofis, historis dan eksperimen. Dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada.³⁰ Alasan penggunaan metode ini, karena masalah yang diangkat bersifat kasuistik, sehingga membutuhkan data selengkap-lengkapnyanya untuk mengetahui sebab-sebab yang sesungguhnya.

Nalar yang digunakan adalah nalar induktif atau dari umum ke khusus, dari ruang teoritis ke ruang praksis. Induktif yaitu suatu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.³¹

²⁹ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1981), hlm. 136

³⁰ Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 72.

³¹ Sudjana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 6

Tahapan yang digunakan dalam proses analisis data, meliputi (a) edit atau seleksi, (b) reduksi, (c) klasifikasi dan (d) interpretasi. Maksud dari tahapan tersebut antara lain:

- Edit/seleksi: proses pengeditan dan penyeleksian yang disesuaikan atau dikonfirmasi dengan ragam pengumpulan data, sumber data untuk menjawab fokus penelitian.
- Reduksi: proses reduksi dilakukan untuk memperoleh data halus.
- Klasifikasi: penggolongan data dilakukan untuk mengorganisir data dan menemukan ungkapan-ungkapan, uraian-uraian atau penjelasan-penjelasan yang menonjol dan spesifik, sehingga dapat ditemukan data yang relevan dengan fokus penelitian.
- Interpretasi: penafsiran data dilakukan untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam setiap data yang dikumpulkan. Pada proses ini dilakukan konfirmasi dengan sumber data. Proses konfirmasi ini sebagai upaya melihat relevansi kebenaran teori, konsep dengan fenomena di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan skripsi ini tersusun menjadi lima bab, antara lain:

Bab satu berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi gambaran umum membahas tentang letak geografis, keadaan penduduk, yaitu pendidikan, mata pencaharian, kehidupan keberagamaan, peta basis kultur Abangan, NU dan Muhammadiyah, tempat pindah partai dan perolehan suara.

Bab ketiga berisi kajian teori meliputi pembatasan istilah, kultur dan ideologi politik, UU no. 31 tahun 2002 tentang partai politik dan UU no. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum, Peter Blau dan teori pertukaran, proposisi pertukaran dari Homans.

Bab keempat membincang motif dan proses pindah partai meliputi bahasan tentang motif perpindahan partai yaitu motif ekonomi dan *prestise*, serta proses terjadinya pindah partai.

Bab kelima yaitu penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian sepenuhnya tentang motif dan proses pindah partai pada masyarakat santri pemilih, maka sebagai akhir dari penelitian serta pembahasan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan:

1. Motif pindah partai yaitu motif ekonomi dan *prestise*. Motif ekonomi terdapat pada Desa Getas dan Desa Ngawu. Motif *prestise* terdapat pada Desa Banyusoco, Bleberan dan Desa Playen. Munculnya motif ekonomi sebab tidak adanya keseimbangan antara *reward* dan *cost* antara warga NU dan elit PKB di Desa Ngawu dan Desa Getas, baik *reward* yang bersifat ekstrinsik maupun intrinsik. Munculnya motif *prestise* sebab tidak adanya kegiatan, interaksi dan perasaan yang bersifat timbal balik antara warga NU dengan elit PKB di Desa Banyusoco dan Desa Bleberan, serta antara warga Muhammadiyah dengan elit PAN di Desa Playen.
2. Proses pindah partai, melibatkan satu tradisi yang hingga detik ini masih tetap eksis, yaitu *money politics*. *Money politics* merupakan strategi klasik yang digunakan oleh PAN, PKPB dan PKS untuk memobilisasi, memprovokasi serta mempropaganda warga NU untuk pindah dari PKB. Strategi tersebut juga bervariasi. Ada yang melewati jalur tim sukses PKB [strategi PKPB di Desa Ngawu], ada yang memanfaatkan kelompok da'i [strategi PKS di Desa

Getas] dan ada juga yang menggunakan jasa tim kemenangan TPS [strategi PAN di Desa Banyusoco dan Desa Bleberan]. Yang jelas, strategi yang dilancarkan ketiga partai tersebut mampu menggiring warga NU untuk keluar dari PKB. Sementara itu, strategi politik uang oleh PAN -dan korupsi oleh oknum PAN- ternyata membawa imbas bagi warga Muhammadiyah terpelajar Desa Playen, yaitu berpaling dari PAN dan pindah ke PKS.

B. Saran-Saran

Setelah meneliti motif dan proses pindah partai, penyusun berharap:

1. Dalam usaha mengembangkan serta mensosialisasikan perilaku politik yang baik harus benar-benar memahami sejarah politik Barat dan Timur, sistem politik serta bentuk perbenturan keduanya. Hal tersebut perlu sekali dikembangkan oleh mahasiswa Sosiologi Agama yang mengangkat tema sosial politik keagamaan agar tidak mudah terkontaminasi pada wilayah paradigma yang justru akan menyesatkan, sehingga dalam pemaparannya bersifat sepihak dan itu artinya menghilangkan nilai-nilai sosiologis dalam kajian tema tersebut.
2. Semoga skripsi yang singkat ini membawa angin perubahan dan melepaskan keterkungkungan, eksploitasi, ketertindasan hingga matinya daya kritis akibat ulah NU dan Muhammadiyah yang selalu mempertahankan hegemoni, sehingga pengikutnya sulit maju, dan tidak mau melepaskan hegemoni, yang pada akhirnya gerak peradaban menjadi stagnan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Almond, Gabriel dan Powell, G. Bingham. *Comparative Politics: A Development Approach*. Boston: Little Brown, 1966
- A. Partanto, Pius dan Al Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994
- Asmawi. *PKB Jendela Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999
- Budiardjo, Miriam (ed). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia, 1981
- Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial*. Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1984
- Djam'annuri, dkk (ed). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002
- E. Conolly, William. *Political Science and Ideology*. New York: Antherton Press, 1967
- F. Ilchman, Warren. *The Political of Change*. Berkeley: University of California Press, 1969
- Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Geertz, Clifford. *Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1981
- , *Ideology as a Cultural System*, dalam David E. Aypier (ed). *Ideology and Discontent*. New York: The Free Press, 1965
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1981
- Hamid, Edy Suandi. "Masalah Utama Ekonomi Indonesia: Tantangan Bagi Rezim Pemerintahan 2004-2009" dalam jurnal *UNISIA*, edisi April-Juni 2004
- Ilyas, Yunahar, dkk (ed). *Muhammadiyah dan NU: Reorientasi Wawasan Keislaman*. Yogyakarta: LPPI UMY, 1993

- Ismawan, Indra. *Money Politics: Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999
- Karim, M. Ruslim. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Riset Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985
- , *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta 1990
- Litbang Kompas. *Peta Pemilihan Umum 1999-2004*. Jakarta: Kompas, 2004
- M. Echols, John. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1984
- M. Poloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Moeljarto. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995
- Munir Mulkhan, Abdul. "Politik Santri dalam Daur Ulang Kontrak Sosial" dalam jurnal *UNISIA*, edisi April-Juni 2004
- , *Moral Politik Santri: Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas*. Jakarta: Erlangga, 2003
- Mustafied "Akar Struktural dan Teologis Pragmatisme Politik Ulama" dalam *Tradem*, edisi VII Februari-April 2005
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003
- Paul Johnson, Doyle. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern II*. Jakarta: Gramedia, 1994
- Qomar, Mujammil. *NU Liberal: dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan, 2002
- Raga Maran, Rafael. *Pengantar Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002
- Rejai, Mostafe (ed). *Political Ideology: Theoretical and Comparative Perspectives*, dalam *Decline of Ideology*. Chicago: Aldine-Atherton, 1971
- Ridwan. *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2004
- S. Lucas, Henry. *A Short History of Civilization*. New York: Mcgraw-Hill Book Company, 1953
- Shihab, Alwi. *Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2001
- Shils, Edward. *Ideology The Concept and Function of Ideology*, dalam *International Encyclopedia of The Social Sciences*
- Simuh. *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*. Yogyakarta: Pilar Media, 2001
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers 2002
- Soeprapto, Riyadi. *Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Sudjana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 1991
- Widjaja, Albert. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1982
- Yusuf Khoiruddin, Akhmad. *Konflik Antar Pemuka Agama tentang Tradisi Tahlilan*. Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006
- Zaenuddin, Muhammad. *Membangun Wacana Intelektual Perspektif Keagamaan, Sosial-Kemasyarakatan dan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Zamroni. *Pengantar dan Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992

CURRICULUM VITAE

Nama : Mashuri
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Desember 1981
Alamat Asal : Desa Rembang, Kecamatan Rembang
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
Alamat Jogja : PP. al-Munawwir Komplek E (8) Krapyak Yogyakarta
Kode Pos 55002

Orang Tua

Nama Ayah : Soleh
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Chusnul Chotimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

- SDN Rembang lulus tahun 1994
- MTs Ma'arif Pekoren lulus tahun 1997
- MAK DU, PP Darul Ulum Jombang lulus tahun 2000
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2006